

Pelaporan Aset Sumber Daya Alam dan Lingkungan (*Natural Capital Accounting*)

Delima Ramdani¹⁾, Bonor PH Manullang²⁾, Ricky Agustian³⁾, Muhammad Rizki⁴⁾,
Daryanto Hesti Wibowo^{5)*}

^{1)2)3)4)5)*} Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa
Unggul Jalan Arjuna Utara No. 09, Kebon Jeruk, Jakarta, Indonesia

^{5)*} esaungguldar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Natural Capital Accounting* (NCA) sebagai pendekatan akuntansi lingkungan yang mengintegrasikan nilai ekonomi dan ekologi ke dalam sistem pelaporan organisasi, dengan fokus pada relevansinya terhadap praktik pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Secara empiris, studi ini menelaah data *System of Environmental-Economic Accounting* (SEEA) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019–2023 yang menunjukkan terjadinya penurunan nilai aset lingkungan sebesar 19 triliun rupiah di tengah peningkatan signifikan nilai aset ekonomi nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan aset lingkungan melalui NCA berpotensi memperbaiki transparansi dan akuntabilitas kebijakan pembangunan, namun penerapannya masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya menangkap nilai intrinsik ekosistem. Dalam konteks teori legitimasi, NCA dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan maupun pemerintah, sementara teori akuntansi kritis menyoroti bahwa proses valuasi moneter terhadap modal alam masih didominasi oleh logika pasar dan efisiensi ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi kebijakan akuntansi lingkungan diperlukan agar NCA tidak hanya menjadi alat pelaporan administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan ekologis dan ekonomi hijau di Indonesia.

Kata kunci: *Natural Capital Accounting, Legitimacy Theory, Critical Accounting Theory, Keberlanjutan, Aset Lingkungan.*

Abstract

This study aims to analyze the application of Natural Capital Accounting (NCA) as an environmental accounting approach that integrates economic and ecological values into organizational reporting systems, with a focus on its relevance to sustainable development practices in Indonesia. Empirically, this study examines data from the Central Statistics Agency's (BPS) System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) for 2019–2023, which shows a decline in the value of environmental assets of 19 trillion rupiah amid a significant increase in the value of national economic assets. The results of the analysis show that reporting environmental assets through NCA has the potential to improve the transparency and accountability of development policies, but its implementation is still symbolic and does not fully capture the intrinsic value of ecosystems. In the context of legitimacy theory, NCA is seen as an important instrument for maintaining public trust in the sustainability performance of companies and the government, while critical accounting theory highlights that the process of monetary valuation of natural capital is still dominated by market logic and economic efficiency. This study concludes that reformulation of environmental accounting policy is necessary so that NCA does not merely become an administrative reporting tool, but also a strategic instrument in realizing ecological justice and a green economy in Indonesia.

Keywords: *Natural Capital Accounting, Legitimacy Theory, Critical Accounting Theory, Sustainability, Environmental Assets.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah terutama dalam sektor pertambangan dan perkebunan. Kedua sektor ini memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional, baik melalui penciptaan lapangan kerja, penerimaan devisa ekspor, maupun kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) (Irham et al., 2024). Namun demikian, aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah menimbulkan berbagai dampak lingkungan serius, seperti deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2024, menunjukkan bahwa sekitar 630 ribu hektar kawasan hutan mengalami kerusakan setiap tahunnya. Tahun 2024 tercatat terdapat deforestasi netto sebesar 175,4 ribu hektar dengan mayoritas terjadi di kawasan hutan sekunder. Kerusakan ini berdampak langsung pada ekosistem serta keanekaragaman hayati, dan memperburuk kerusakan lingkungan secara umum. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester II tahun 2023 telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020-2023 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta instansi terkait lainnya. Salah satu permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan itu terkait kerusakan lingkungan pada areal bekas tambang. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, perusahaan tambang diwajibkan untuk melakukan revegetasi pada lahan kritis bekas tambang. Proses revegetasi ini dilakukan dengan menanam tumbuhan reklamasi di area yang sudah tidak lagi digunakan untuk penambangan, meskipun kegiatan tambang di bagian lain dari lokasi tersebut masih berlangsung. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, reklamasi merupakan upaya yang dilakukan selama tahapan kegiatan pertambangan untuk mengelola, memulihkan, dan meningkatkan kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan tujuan awalnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan, di mana perolehan keuntungan finansial perusahaan kerap terjadi dengan mengabaikan atau mengurangi keseimbangan ekosistem alam.

Akuntansi konvensional yang selama ini menjadi pilar utama dalam pelaporan keuangan perusahaan, dinilai belum mampu menangkap secara utuh dampak aktivitas bisnis terhadap lingkungan, dikarenakan akuntansi konvensional selama ini hanya menilai kinerja perusahaan berdasarkan aspek finansial yang bersifat historis dan terbatas pada pencatatan transaksi keuangan (Anindia et al., 2025). Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, akuntansi berfungsi untuk memberikan informasi untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Menurut Anggraini et al. (2023), selama ini perusahaan hanya menyampaikan informasi mengenai hasil operasi keuangan perusahaan kepada pemakai, tetapi mengabaikan eksternalitas dari operasi yang dilakukannya, misalnya polusi udara, pencemaran air, pemutusan hubungan kerja, dan lainnya.

Laporan tahunan PT Vale Indonesia Tbk dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2022, disebutkan bahwa adanya cadangan kewajiban reklamasi (*asset retirement obligation*) sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan pascatambang. Namun, pengakuan tersebut masih terbatas pada biaya teknis penutupan tambang, seperti penimbunan kembali lahan bekas galian dan stabilitas tanah, tanpa memasukkan biaya pemulihan fungsi ekosistem secara menyeluruh. Nilai moneter yang disajikan tidak mencerminkan ekologis yang lebih luas, seperti hilangnya jasa lingkungan (*ecosystem services*) meliputi air bersih, tutupan hutan, keanekaragaman hayati, dan daya dukung ekosistem air Danau Matano yang terdampak langsung oleh kegiatan tambang. Selain itu, PT Bumitama Agri Ltd secara terbuka menyatakan komitmen terhadap kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) dalam Sustainability Report 2022, namun berbagai laporan investigatif dari organisasi lingkungan menunjukkan adanya konversi lahan gambut, deforestasi, dan kebakaran hutan di sekitar area konsesi perusahaan. Aktivitas tersebut menimbulkan eksternalitas negatif berupa hilangnya habitat orangutan, meningkatnya emisi karbon, serta degradasi fungsi ekosistem hutan tropis. Namun, dalam laporan tahunan dan keberlanjutan yang diterbitkan Bumitama, biaya lingkungan dan sosial hanya disajikan sebagai bagian dari

operating expenses tanpa rincian nilai ekonomi kerugian ekosistem maupun estimasi biaya restorasi karbon yang timbul akibat aktivitas tersebut. Tidak ada pengakuan eksplisit terhadap penurunan nilai modal alam (*natural capital depletion*) ataupun liabilitas ekologis yang semestinya muncul sebagai konsekuensi dari degradasi sumber daya alam.

Kondisi ini menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan tampak sehat secara finansial, sementara dampak lingkungan yang ditanggung masyarakat luas tidak diinternalisasi ke dalam sistem pelaporan akuntansi. García-López & Pérez-Hernández (2024) menyebutkan bahwa *Natural Capital Accounting* hadir sebagai kerangka sistematis yang dirancang untuk mengukur, menilai, dan melaporkan aset serta jasa alam (*natural assets and ecosystem services*) dalam satuan moneter maupun fiskal sehingga dapat diintegrasikan ke dalam laporan keuangan dan kebijakan perusahaan. Berdasarkan teori legitimasi yang dikemukakan oleh Deegan (2019) perusahaan beroperasi dalam suatu *social contract* dengan masyarakat, di mana keberlanjutan izin sosialnya sangat bergantung pada sejauh mana aktivitas perusahaan dianggap sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Ketika terjadi pelanggaran terhadap norma ekologis, seperti deforestasi atau pencemaran, legitimasi sosial perusahaan terancam menurun. Perusahaan perlu memperlihatkan operasi positif untuk mencapai legitimasi dan memperlihatkan citra yang baik dari perusahaannya (Pertiwi & Ariyanto, 2025). Tanpa pengakuan dan dukungan Masyarakat, regulator, pelanggan serta pemangku kepentingan lain, perusahaan tidak mampu bertahan dalam jangka panjang meskipun kinerja keuangannya tampak baik (Riyadh et al., 2020).

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melakukan analisis dan tinjauan kritis terhadap berbagai kajian yang membahas mengenai *Natural Capital Accounting*, serta mengidentifikasi faktor-faktor penting yang dapat menjadi arah pengembangan penelitian dimasa yang akan datang. Fokus penulisan yang ada terutama mencakup isu-isu terkait modal alam, jasa ekosistem, keanekaragaman hayati, valuasi modal alam, serta praktik dan konsep *Natural Capital Accounting* itu sendiri.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Legitimacy Theory*

Menurut Deegan (2019), konsep kontrak sosial (*social contract*) merupakan dasar dari teori legitimasi, dimana hal ini menggambarkan hubungan implisit antara organisasi dan masyarakat yang menunjukkan bahwa keberlangsungan hidup suatu perusahaan bergantung sejauh mana aktivitasnya sejalan dengan nilai, norma, dan ekspektasi sosial yang berlaku. Teori Legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan memastikan aktivitas operasionalnya diterima oleh pemangku kepentingan eksternalnya dibawah norma yang ada pada lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan (Sayuti, 2024). Dengan begitu, suatu perusahaan perlu mempertimbangkan aspek-aspek dalam setiap kegiatan dan kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan, nilai dan norma yang berlaku dan harapan masyarakat. Menurut Pratama (2025), kesenjangan legitimasi dapat terjadi jika adanya perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan masyarakat yang mengancam keberlangsungan perusahaan. Hal ini dapat dicegah dengan pemantauan dan penyesuaian nilai-nilai sosialnya, serta peningkatan persepsi publik terhadap citra perusahaan. Teori legitimasi relevan dengan pendekatan akuntansi lingkungan dengan mengintegrasikan ekonomi dan ekologi ke dalam sistem pelaporan akuntansi. Perusahaan mengungkapkan informasi terkait informasi satuan moneter maupun fisik dari nilai modal alam untuk mendapatkan penerimaan publik dan memperkuat legitimasi mereka. Praktik ini menyelaraskan tindakan perusahaan dengan harapan masyarakat akan transparansi, menumbuhkan kepercayaan, dan berkontribusi pada kesuksesan perusahaan yang berkelanjutan (Toumi, 2025).

2.2 *Critical Accounting Theory*

Cooper & Hopper (2006) dalam bukunya menjelaskan bahwa *critical accounting* merupakan suatu pendekatan yang melihat akuntansi sebagai praktik sosial yang terikat kepentingan, berfungsi sebagai alat kontrol, dan memiliki peran dalam perubahan struktur kekuasaan di dalam masyarakat. Teori akuntansi kritis menyediakan kerangka kerja yang bermanfaat untuk memahami hubungan rumit antara prosedur akuntansi dan struktur kekuasaan di dalam perusahaan dengan mengungkap dinamika kekuasaan dan mendorong akuntabilitas (Khatun &

Hossain, 2023). Teori akuntansi kritis didasarkan pada pandangan bahwa akuntansi bukanlah sistem netral untuk mencatat realistik ekonomi, melainkan suatu praktik sosial, politik, dan ideologis yang berperan dalam membentuk struktur kekuasaan dan relasi sosial (Larrinaga & Garcia-Torea, 2022). Wulandari (2023) menjelaskan bahwa kebutuhan dari pemangku kepentingan yang semakin banyak dan informasi yang lebih kompleks menjadi dasar pentingnya akuntansi kritis dalam penelitian sosial. Akuntansi kritis dianggap dapat memberikan tempat bagi suara pemangku kepentingan yang lemah ataupun kurang kuat dalam struktur sosial. Teori ini mendorong penggunaan akuntansi sebagai alat untuk menciptakan perubahan progresif dan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, misalnya dengan mengembangkan metrik yang mengukur dampak sosial dan lingkungan serta memperluas transparansi dan akuntabilitas kepada semua pemangku kepentingan.

2.3 Natural Capital Accounting

Pearce (1998) mengungkapkan bahwa natural capital accounting adalah proses sistematis untuk menilai, mengukur, dan memasukkan stok modal alam dan jasa ekosistem ke dalam sistem akuntansi ekonomi agar kerugian lingkungan dapat diperlakukan sebagai depresiasi dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Natural Capital Accounting sebagai suatu pendekatan akuntansi lingkungan yang berupaya mengintegrasikan data ekonomi dan ekologi ke dalam sistem pelaporan organisasi secara sistematis. Menurut Fleming et al. (2022), natural capital accounting berfungsi sebagai kerangka yang menjembatani antara modal alam seperti hutan, air, udara, dan keanekaragaman hayati dengan aktivitas ekonomi, organisasi dapat menilai stok dan aliran jasa ekosistem baik dalam satuan fisik maupun moneter, sehingga menghasilkan informasi yang lebih komprehensif untuk pengambilan keputusan berkelanjutan. NCA mencakup penyusunan empat jenis akun utama, yaitu ecosystem extent account (luas ekosistem), ecosystem condition account (kondisi ekosistem), ecosystem service flow account (arus jasa ekosistem secara fisik dan moneter), serta ecosystem asset account (nilai ekonomi dari aset ekosistem). Vardon et al. (2023), menegaskan bahwa keberhasilan penerapan natural capital accounting dalam pengambilan keputusan penggunaan lahan sangat bergantung pada konsistensi metodologi, dukungan kebijakan, adopsi teknologi, dan kesadaran sosial. Dengan memperkuat dimensi sosial dan nilai-nilai etis dalam akuntansi lingkungan, NCA berpotensi menjadi instrumen kunci dalam transisi menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode review literatur yang difokuskan pada *Natural Capital Accounting* secara praktik dan konsepnya. Proses penelitian mengimplikasikan pengumpulan teori dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal artikel, data dari lembaga yang relevan serta hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Setelah seluruh data terkumpul, analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi sesuai tema-tema yang relevan, seperti konsep *natural capital accounting*, praktik implementasinya, serta hambatan yang terjadi. Setiap literatur yang ditelaah kemudian dievaluasi kembali guna menilai sejauh mana pelaporan aset dan sumber daya alam dan lingkungan dapat berkontribusi untuk keberlanjutan perusahaan.

ANALISIS KRITIS

Akuntansi menjadi salah satu bagian dari sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan bagi perusahaan. Akuntansi menggambarkan tren dan interaksi di masa lalu, sedangkan pembuatan kebijakan memerlukan pandangan ke depan dan penilaian terhadap pilihan kebijakan saat ini dan di masa depan. Vardon et al. (2023) menjelaskan bahwa Natural Capital Accounting dapat menunjukkan nilai dampak potensial dari jalur pembangunan alternatif, hal ini memungkinkan para pembuat kebijakan memahami konsekuensi lingkungan dan ekonomi dari berbagai pilihan pembangunan sebelum diimplementasikan.

Natural capital accounting telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, pada tahun 2021 Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui kerangka kerja *System of Environmental–Economic Accounting Ecosystem Accounting* (SEEA EA), memperluas standar yang disepakati secara internasional tentang cara menyusun pengukuran tentang lingkungan

dan hubungannya dengan aktivitas ekonomi (Mandle et al., 2025). Menurut Badan Pusat Statistik SEEA merupakan kerangka kerja konseptual yang berfungsi untuk memahami interaksi antara ekonomi dan lingkungan beserta perubahannya dari waktu ke waktu. SEEA dirancang menjadi sistem multiguna dan relevan dalam sejumlah cara untuk pengembangan dan evaluasi kebijakan serta pengambilan keputusan. Pertama, ringkasan informasi (disediakan dalam bentuk agregat dan indikator) dapat diterapkan pada isu dan bidang lingkungan yang menjadi fokus para pengambil keputusan. Kedua, informasi terperinci yang mencakup beberapa faktor pendukung utama perubahan lingkungan yang dapat digunakan untuk memberikan pemahaman tentang isu-isu kebijakan. Ketiga, data yang terkandung dalam SEEA dapat digunakan dalam model dan skenario yang dirancang untuk menilai dampak ekonomi dan lingkungan nasional dan internasional dari berbagai skenario kebijakan di dalam suatu negara, antar negara, dan tingkat global.

Sistem Neraca Lingkungan-Ekonomi Indonesia (SISNERLING) merupakan implementasi dari kerangka *System of Environmental-Economic Accounting* (SEEA) yang bertujuan mengintegrasikan data lingkungan dan ekonomi untuk mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dokumen resmi BPS tahun 2019 menjelaskan bahwa SEEA berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengukur keterkaitan antara aktivitas ekonomi dan kondisi lingkungan melalui penyusunan neraca aset fisik dan moneter. Dengan pendekatan ini, kontribusi sumber daya alam dapat diintegrasikan dalam perhitungan produk domestik bruto yang disesuaikan terhadap deplesi alam atau dikenal sebagai *green GDP* guna mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2019–2023 mengenai Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia (SEEA) menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, terjadi divergensi yang semakin tajam antara nilai aset ekonomi yang diproduksi (*produced assets*) dan nilai aset lingkungan (*non-produced assets*). Nilai aset yang diproduksi meningkat konsisten dari sekitar Rp 93.000 triliun pada 2019 menjadi lebih dari Rp 118.000 triliun pada 2023, yang mencerminkan ekspansi sektor industri, infrastruktur, dan investasi nasional. Sebaliknya, nilai aset lingkungan mengalami penurunan bertahap dari sekitar Rp 19 triliun menjadi Rp 15.4 triliun dalam periode yang sama, terutama disebabkan oleh deplesi sumber daya energi fosil, degradasi hutan, dan konversi lahan produktif. Dengan demikian, kontribusi aset lingkungan terhadap total kekayaan nasional turun dari sekitar 17 persen menjadi hanya 12 persen, sedangkan dominasi aset ekonomi meningkat hingga lebih dari 85 persen. Pola ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional masih berakar kuat pada eksploitasi sumber daya alam, sementara kapasitas ekologisnya terus melemah.

Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana alam direduksi menjadi sekedar aset ekonomi yang dapat diukur melalui nilai pasar dan disesuaikan dalam perhitungan *green GDP*. Dalam kerangka SEEA, penilaian tersebut dilakukan dengan metode *Net Present Value* (NPV), *Resource Rent*, dan *Right-Based Valuation* yang seluruhnya mengandalkan konsep nilai pasar (*market value*). Meskipun secara pragmatis metode ini memudahkan perumusan kebijakan ekonomi lingkungan, pendekatan tersebut mengandung konsekuensi ideologis yang signifikan. Dengan PT vamengubah alam menjadi entitas ekonomi yang dapat dihitung, dievaluasi, dan dibandingkan, NCA secara tidak langsung menundukkan nilai intrinsik ekologis di bawah logika pasar dan produktivitas ekonomi. Akibatnya, alam tidak lagi dipandang sebagai sistem kehidupan yang memiliki hak eksistensi, tetapi sebagai aset ekonomi yang dapat dieksploitasi sejauh nilainya masih tercatat dalam neraca nasional (Chen et al., 2025).

Teori akuntansi kritis berangkat dari pandangan bahwa akuntansi merupakan praktik sosial dan politik yang merefleksikan serta mereproduksi struktur kekuasaan dan kepentingan ekonomi dominan. Dalam SEEA, proses valuasi moneter terhadap aset lingkungan merupakan manifestasi dari rasionalitas instrumental yang berorientasi pada efisiensi dan kontrol, bukan pada pelestarian (Akhtar & Cavalletti, 2025). Angka-angka dalam neraca lingkungan menciptakan ilusi keberlanjutan seolah-olah kerusakan ekologis dapat dikompensasi dengan penyusutan aset atau penyesuaian dalam *green GDP*. Dengan demikian, SEEA menjadi perangkat legitimasi teknokratis yang memungkinkan eksploitasi sumber daya alam tetap berlangsung di bawah klaim keberlanjutan. Dalam kerangka teori kritis, praktik ini merupakan bentuk dominasi terhadap cara memahami dan mengelola lingkungan, di mana akuntansi berfungsi bukan sebagai alat

transformasi sosial, melainkan sebagai instrumen dominasi yang menormalkan relasi eksploitatif antara manusia, negara, dan alam. Kecenderungan penurunan nilai aset lingkungan di tengah peningkatan aset ekonomi menunjukkan bahwa *green GDP* atau *adjusted GDP* yang dilaporkan BPS sebenarnya menciptakan ilusi keberlanjutan yakni situasi di mana kerusakan ekologis dianggap telah diimbangi secara administratif oleh penyesuaian dalam neraca ekonomi. Dalam pandangan teori legitimasi Deegan (2019), kondisi ini menggambarkan bagaimana negara dan institusi ekonomi berupaya mempertahankan legitimasi sosial di tengah tekanan global untuk menunjukkan komitmen terhadap SDGs, khususnya tujuan ke-13 (aksi iklim) dan ke-15 (ekosistem darat). Akan tetapi, legitimasi tersebut bersifat simbolik karena tidak disertai perubahan substantif terhadap paradigma pembangunan yang memusatkan alam sebagai kepentingan manusia. Akibatnya, keberlanjutan yang dihasilkan bersifat administratif hanya terukur secara angka tetapi kehilangan makna ekologis.

Reformulasi sistem akuntansi lingkungan nasional perlu dilakukan agar tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran, tetapi juga sebagai dasar perumusan strategi pembangunan yang berkeadilan ekologis. Pendekatan *Natural Capital Accounting* perlu ditransformasikan menjadi perangkat kebijakan yang mampu mengarahkan keputusan fiskal, investasi, dan perencanaan pembangunan berbasis pada nilai dan kapasitas alam. Artinya, setiap kebijakan pembangunan harus menempatkan neraca modal alam sebagai instrumen wajib dalam proses perencanaan dan evaluasi, sehingga eksploitasi sumber daya dapat dikendalikan berdasarkan batas daya dukungnya. Pemerintah perlu mengintegrasikan data NCA ke dalam *green budgeting* (anggaran hijau), di mana setiap program pembangunan diukur tidak hanya berdasarkan kontribusi ekonominya, tetapi juga terhadap dampak ekologis yang ditimbulkannya. Kebijakan fiskal seperti subsidi, pajak lingkungan, dan insentif investasi harus diarahkan untuk memperkuat restorasi dan regenerasi sumber daya alam, bukan sekadar mendukung ekspansi ekonomi yang berisiko memperdalam kerusakan ekologis.

Hasil NCA perlu menjadi acuan langsung dalam pengambilan keputusan ekonomi makro dan tata ruang nasional. Pemerintah harus menetapkan batas eksploitasi berdasarkan *natural capital thresholds*, yaitu ambang batas ekologis yang apabila terlampaui akan menimbulkan kerusakan permanen. Dengan demikian, kebijakan pembangunan dapat diarahkan pada model transisi ekonomi hijau, di mana penggunaan sumber daya alam dilakukan secara sirkular, efisien, dan berbasis pada prinsip restoratif. Pendapatan negara dari pertambangan, minyak atau gas yang dialokasikan untuk membentuk dana kekayaan nasional, yang digunakan untuk mendukung program rehabilitasi hutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan investasi energi terbarukan. Pendekatan ini tidak hanya mengompensasi deplesi lingkungan, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Analisis terhadap praktik pelaporan aset sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia dalam *System of Environmental-Economic Accounting* (SEEA) yang ditunjukkan oleh BPS tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa pertumbuhan aset ekonomi Indonesia terus meningkat, sementara aset lingkungan mengalami penurunan berkelanjutan. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa pembangunan nasional masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam dan belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip berkelanjutan. Meskipun *natural capital accounting* diadopsi untuk memperkuat legitimasi kebijakan lingkungan, penerapannya masih belum maksimal karena belum menghasilkan perubahan substantif pada perilaku korporasi maupun kebijakan publik.

Temuan ini menegaskan bahwa pelaporan aset sumber daya alam dan lingkungan harus diarahkan tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ekologi. Reformasi kebijakan diperlukan untuk memastikan hasil *natural capital accounting* digunakan dalam penganggaran hijau dan perencanaan pembangunan, serta memperkuat tata kelola sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian mendatang perlu mengevaluasi efektivitas implementasi pelaporan aset sumber daya alam dan lingkungan lintas sektor dan menilai dampaknya terhadap legitimasi sosial, kinerja berkelanjutan, dan keputusan fiskal pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar, A., & Cavalletti, B. (2025). Operationalising SEEA-EA for water-related ecosystem services assessment. In *Journal of Environmental Management* (Vol. 395). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.127994>
- Angraini, D. N., Sepriani, D., Evaliana, Wijaya, I. D., Rendi, M., Rahma, R., & Khodijah, S. (2023). Substansi Akuntansi Sosial dan Lingkungan Terhadap Keberlangsungan Perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 214.
- Anindia, D., Novianti, R., & Yusmaiarti. (2025). Green Accounting VS Akuntansi Konvensional: Perbedaan dan Dampaknya. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 3(1).
- Chen, Y., Conner, N., Liu, D., & Vardon, M. (2025). Opportunities and barriers to ridge-to-reef marine policy: A review and the role of natural capital accounting. In *Ocean and Coastal Management* (Vol. 270). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.107912>
- Cooper, D. J., & Hopper, T. (2006). Critical Theorising in Management Accounting Research. In *Management Accounting Research* (Vol. 1, pp. 207–245). [https://doi.org/10.1016/S1751-3243\(06\)01007-8](https://doi.org/10.1016/S1751-3243(06)01007-8)
- Deegan, C. M. (2019). Legitimacy Theory Despite its enduring popularity and contribution, time is right for a necessary makeover. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(8), 2307–2329.
- Fleming, A., O’Grady, A. P., Stitzlein, C., Ogilvy, S., Mendham, D., & Harrison, M. T. (2022). Improving acceptance of natural capital accounting in land use decision making: Barriers and opportunities. *Ecological Economics*, 200. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107510>
- Irham, F., Zidan Dairobby, M. R., Gus Fauzan, R., & Rienaldy Pramasha, R. (2024). Peran Sumber Daya Alam Dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Khatun, Most. M., & Hossain, Md. S. (2023). Critical Accounting Theory: Unveiling Power Dynamics and Enhancing Accountability - An Empirical Study on Existing Literature. *International Journal of Science and Business*, 25(1), 106–116. <https://doi.org/10.58970/IJSB.2128>
- Larinaga, C., & Garcia-Torea, N. (2022). An ecological critique of accounting: The circular economy and COVID-19. *Critical Perspectives on Accounting*, 82. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102320>
- Mandle, L., Angarita, H., Moreno, J., Goldstein, J. A., Melo L, S. F., Echeverri, A., Rojas, N., & Villalba, F. D. (2025). Natural capital accounting reveals ecosystems’ role in water and energy security in Colombia’s Sinú Basin. *Communications Earth and Environment*, 6(1). <https://doi.org/10.1038/s43247-025-02254-9>
- Pearce, D. (1998). Auditing the Earth: The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital. *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 40(2), 23–28. <https://doi.org/10.1080/00139159809605092>
- Pertiwi, K. M., & Ariyanto, D. (2025). Pengaruh Green Accounting dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 14(08), 1107–1117. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/>
- Pratama, D. A. (2025). Blue Accounting Dalam Perspektif Teori Legitimasi dan Stakeholder. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 3(2), 1–16. <https://doi.org/10.26418/kiafe.v3.i2.82760>
- Riyadh, H. A., Al-Shmam, M. A., Huang, H. H., Gunawan, B., & Alfaiza, S. A. (2020). The analysis of green accounting cost impact on corporations financial performance. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(6), 421–426. <https://doi.org/10.32479/ijee.9238>
- Sayuti, A. (2024). Tingkat Pengungkapan Emisi dan Kepatuhan Lingkungan: Analisis Sebelum dan Sesudah Penerapan Aturan OJK No. 16/SEOJK.04/2021 dalam Konteks Teori Legitimasi dan Stakeholder. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(6), 843–848.

-
- Toumi, A. (2025). The impact of climate-related risks on firm performance: evidence from the healthcare sector. *Journal of Business and Socio-Economic Development*, 5(3). <https://doi.org/10.1108/JBSED-02-2025-0042>
- Vardon, M., Lucas, P., Bass, S., Agarwala, M., Bassi, A. M., Coyle, D., Dvaskas, A., Farrell, C. A., Greenfield, O., King, S., Lok, M., Obst, C., O'Callaghan, B., Portela, R., & Siikamäki, J. (2023). From COVID-19 to Green Recovery with natural capital accounting. *Ambio*, 52(1), 15–29. <https://doi.org/10.1007/s13280-022-01757-5>
- Wulandari, P. P. (2023). Implikasi Kolaborasi Multidisplin dalam Penelitian Akuntansi Kritis: Sebuah Refleksi. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 19(1), 117–124.